

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada instrumen hukum internasional, impor sementara diatur dalam Istanbul Convention 1990. Konvensi tersebut menjelaskan mengenai *temporary admission* (pemasukan sementara), secara prinsip merupakan konsep yang sama dengan impor sementara. Luksemburg merupakan salah satu negara anggota pada Istanbul Convention 1990. Akan tetapi, Meksiko bukan negara anggota dan tidak meratifikasi Istanbul Convention 1990, sehingga konvensi tersebut tidak berlaku bagi Meksiko. Pengaturan impor sementara di Meksiko diatur dalam *Ley Aduanera* (Undang-Undang Bea Cukai Meksiko), peraturan pelaksanaanya, dan Peraturan Umum Perdagangan Luar Negeri. Sistem ini memberi izin masuk sementara bagi barang, termasuk kapal, untuk jangka waktu tertentu dengan syarat dikembalikan ke luar negeri dalam kondisi semula. Pasal 106 *Ley Aduanera* menjadi dasar hukum sistem impor sementara Meksiko. Prosedur teknisnya dijabarkan dalam Pasal 161 Peraturan Pelaksana dan Pasal 4.2.11 Peraturan Umum Perdagangan Luar Negeri, mencakup mekanisme permohonan, kewajiban administratif, dan dokumen pendukung.
2. Penerapan peraturan nasional Meksiko terkait pelanggaran impor sementara dalam hukum nasional Meksiko pada *the Zheng He Case (Luksembourg v. Meksiko)* pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum internasional. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas pelabuhan dan perairan pedalamannya (Pasal 2 UNCLOS), serta kewenangan untuk menetapkan aturan kepabeanan, fiskal, dan imigrasi di wilayah kedaulatan (Pasal 21 dan

25 UNCLOS). Dengan demikian, penerapan *Ley Aduanera* oleh Meksiko terhadap kapal asing dapat dibenarkan. Pada kasus Zheng He, tindakan Meksiko memberikan denda dan menyita kapal dapat dibenarkan karena dilakukan berdasar pada hukum nasionalnya. Namun, dalam aspek implementatif, penegakan hukum tersebut menunjukkan ketidakkonsistensiannya akibat kurangnya koordinasi antarotoritas nasional, mengingat izin sandar yang diberikan oleh otoritas pelabuhan (HMO) terhadap permohonan kapal Zheng He tidak diiringi dengan penilaian kepatuhan terhadap rezim impor sementara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Meksiko sejalan dengan hukum internasional secara normatif, pelaksanaannya masih menyisakan persoalan keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Saran

1. Dalam praktik, pemberian izin sandar oleh otoritas pelabuhan kepada kapal asing seharusnya dilakukan setelah atau bersamaan dengan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan impor sementara. Dengan demikian, kapal asing yang telah memperoleh izin sandar tidak berada dalam posisi dirugikan akibat perbedaan penilaian antarotoritas negara.
2. Meskipun penerapan impor sementara dalam hukum nasional Meksiko tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982, disarankan agar penerapannya dilakukan secara konsisten dan proporsional, sehingga penegakan hukum keabeanan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan.